

HARIAN  
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK  
01 MARET 2011

PENDIRI:  
Ardi, S.Si, Apt

BUTON, BUTENG, BUSEL, BUTUR, WAKATOBI, MUNA, MUBAR, KOLAKA  
BOMBANA, KENDARI, BAUBAU

# Baubau Post

Baubaupost.com

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

Jumat  
12 September 2025

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

## Wali Kota Baubau HYF Perpanjang Jabatan MZ Amril Tamim Sebagai Pj Sekda Baubau



Laporan: Mashuri, Baubau Post, Durasi Times

BAUBAU, BP-Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE memperpanjang masa jabatan Penjabat (Pj) Sekda Kota Baubau kepada Drs Meizat Amril Tamim, M.Si. Pelantikan perpanjangan dilakukan di ruang kerja Wali Kota Baubau, Selasa (09/09/2025).

Dalam sambutannya, pelantikan perpanjangan masa jabatan Drs Meizat Amril Tamim, M.Si, menindaklanjuti surat kepu-

Lanjutan ke Hal: 7

## Inflasi di Kota Baubau Keluar Dari Zona Merah



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc bersama Plt Asisten II Setda Kota Baubau Moh Abduh, STP, M.Si didampingi kepala OPD terkait mengikuti zoom meeting Rakor Pengendalian Inflasi di ruang rapat

Wali Kota Baubau Senin (08/09/2025).

Dalam keterangan persnya, Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc mengungkapkan, pihaknya bersama Forkopimda selalu memantau secara intensif Sidak pasar, Bulog, stok jumlah kualitas dan kuantitasnya. Dan pada zoom meeting

Rakor inflasi, ternyata Kota Baubau telah keluar dari zona merah. Dan untuk Sulawesi Tenggara khususnya Kota Baubau masih terkendali.

Menurut Wa Ode Hamsinah Bolu, apa yang dicapai Kota Baubau saat ini merupakan hasil kerja bersama dari berbagai

Lanjutan ke Hal: 7

## Perkuat Tata Kelola Program JKN, BPJS Baubau Bersinergi dengan Kejari dan Pemkot Bangun Sistem Bebas dari Praktik Curang

Laporan: Firman

BAUBAU, DT-Dalam rangka memperkuat tata kelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta meningkatkan sinergi dengan fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Bau-



Lanjutan ke Hal: 7

## Bupati Bersama Ketua DPRD Butur Terima Kunjungan Mahasiswa UGM Selaku TEP Kerjasama Kementerian Transmigrasi RI



Laporan: Kasrun

BUTUR, BP-Bupati Buton Utara (Butur) Afirudin Mathara, SH.,MH. didampingi Ketua DPRD Hj. Hasrianti Ali, ST.,M. Si. dan Forkopimda Butur, menerima Kun-

jungan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Kerjasama Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, bertempat di Aula Kantor Setda Butur, Rabu (3/9/2025).

Kedatangan Tim Ekspedisi Patriot di Butur dalam rangka melaksanakan riset di wilayah transmigrasi dengan misi mengevaluasi kawasan transmigrasi seb-

Lanjutan ke Hal: 7

## Kemenag dan Pemrov Sultra Luncurkan STQH Nasional 2025, Usung Tema Kerukunan dan Pelestarian Lingkungan

Laporan: Rahim

SULTRA, BP- Kementerian Agama bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meluncurkan gelaran Seleksi Tilawatil Qurâ€™man dan Hadis (STQH) Nasional ke-28 tahun 2025. Acara peluncuran berlangsung di Hotel Azizah Kendari, Selasa (9/9/2025), sekaligus menandai dimu-



Lanjutan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM  
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA  
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post  
(www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi  
per Tanggal 30 Desember 2022



## Wali Kota Baubau HYF Perpanjang Jabatan MZ Amril Tamim Sebagai Pj Sekda Baubau

tusan Gubernur Sultra. Oleh sebab itu, pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada Gubernur Sultra atas penunjukan tersebut. dan juga kepada jajaran Pemerintah Provinsi Sultra atas kerjasamanya dan fasilitasnya, sehingga Penjabat Sekda Kota Baubau dapat dilantik.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini mengungkapkan, posisi,

tugas, dan fungsi, serta kewenangan Penjabat Sekda, sangat strategis dan sentral. kewenangannya sama dengan sekda definitif. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Penjabat Sekda adalah seorang leader dan motor penggerak perangkat daerah. di bawah komandonya, dapat tercipta harmoni dan soliditas langkah organisasi dalam

irama yang sesuai dan pada arah dan tujuan yang sama.

“Karenanya, saudara diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah secara kumulatif, dan melanjutkan pelaksanaan agenda-agenda rutin dan strategis, serta program-program prioritas. yang terdekat, adalah penyusunan perubahan APBD tahun

2025, dan penyusunan APBD 2026 sebagai langkah awal mewujudkan visi misi Kota Baubau 2025-2030,” ungkapnya.

H Yusran Fahim, SE mengucapkan selamat bekerja kepada Drs Meizat Amril Tamim, M.Si dan menjalankan kembali tugas dan tanggung jawab penting dan strategis ini dengan penuh amanah dan profesionalitas. (\*)

## Inflasi di Kota Baubau Keluar Dari Zona Merah

pihak, baik itu dari Pemkot Baubau dan Forkopimda (TPID). Dan terlebih lagi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah menyediakan stok beras. Kemudian Disperindag dan koperasi juga yang mulai menyalurkan beras SPHP.

“Tentunya, kami juga masih mendapatkan masyarakat yang membeli beras SPHP dengan harga diatas standar. Nah ini merupakan PR kita semua, karena kita sudah cukup banyak menyalurkan bantuan beras disaat

harga beras dan bahan pokok melonjak. Kami juga sudah mengeluarkan stok beras gratis, serta ditambah dari Dinas Sosial, dimana harga beras itu harga bersubsidi. Dari Polsek, Babinsa juga sudah menyalurkan bantuan beras,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait dengan beberapa masyarakat yang selalu mengeluhkan terkait harga beras, Wakil Wali Kota Baubau menegaskan, perlunya pihak-pihak terkait untuk mensosialisasi secara intensif terkait pembagian beras gratis dan murah. Dicontohkan, di bumi Perke-

mahan Lakologou beberapa waktu yang lalu, bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyediakan 4 ton, dan lebih dari setengahnya habis karena dibeli oleh masyarakat sekitar Lakologou.

Sehingga, perlunya sosialisasi antara pihak-pihak terkait. Apalagi, sering ada isu terkait harga beras SPHP yang diatas harga normal sehingga masalah tersebut bisa viral, dan menyebabkan kekhawatiran terhadap masyarakat. Oleh sebab itu Pemkot Baubau hadir untuk memberikan jaminan bahwa berasnya ada dan masyarakat tidak khawatir. (\*)

## Perkuat Tata Kelola Program JKN, BPJS Baubau Bersinergi dengan Kejari dan Pemkot Bangun Sistem Bebas dari Praktik Curang

baubau menggelar kegiatan sosialisasi terpadu yang berfokus pada iuran dan upaya pencegahan kecurangan dalam program JKN.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (19/08/2025) dan diikuti oleh para perwakilan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) se-Kota Baubau serta beberapa instansi lain yang turut diundang.

Dipimpin langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Diah Eka Rini, kegiatan ini menjadi momen penting dalam menyamakan pemahaman antara BPJS Kesehatan dan mitra fasilitas kesehatan mengenai prosedur pelayanan Peserta yang benar, serta pentingnya menjaga integritas sistem JKN. Dalam sambutannya, Diah menekankan bahwa salah satu fondasi utama keberlangsungan program JKN adalah terpenuhinya kewajiban atas iuran JKN dan terlindungi dari potensi kecurangan.

“Kami ingin memastikan bahwa semua fasilitas kesehatan memahami betul pentingnya kepesertaan aktif dalam Program JKN. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut hak peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan tepat waktu. Sebab itu perlunya kewajiban

pemerintah yaitu iuran pemberi kerja atas iuran pekerja dan iuran pekerja itu sendiri yang dipungut oleh satuan kerja masing-masing. Bahkan perlunya dukungan dari pemberi kerja untuk mengingatkan pekerjanya yang masih memiliki tunggakan iuran Peserta Mandiri sebelum menjadi Pekerja Penerima Upah,” ujar Diah.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan program JKN, BPJS Kesehatan tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan, penyedia layanan, dan masyarakat. Untuk itu, BPJS Kesehatan telah mengembangkan sistem pelaporan internal yang disebut Whistleblowing System (WBS), sebagai mekanisme untuk mendeteksi dan menangani potensi pelanggaran atau kecurangan dalam pelaksanaan JKN.

“WBS merupakan kanal pelaporan yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang memiliki informasi mengenai dugaan pelanggaran, baik oleh peserta, penyedia layanan, maupun pegawai BPJS Kesehatan sendiri. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami terhadap transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.

Diah menambahkan bahwa laporan yang masuk melalui WBS akan ditindaklanjuti

secara profesional dan rahasia, serta dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menciptakan iklim yang sehat dalam pengelolaan program, sekaligus mencegah kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh praktik tidak etis di dalam ekosistem JKN.

“Sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang penyampaian informasi, tetapi juga menjadi forum dialog antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan terkait kendala yang mungkin terjadi di lapangan. Sebab salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan pemahaman mengenai prosedur pelayanan dan administrasi, yang kadang menimbulkan kesalahan dalam input data atau bahkan potensi manipulasi,” kata Diah.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program JKN tidak hanya diukur dari jumlah peserta atau besarnya cakupan layanan, tetapi juga dari integritas dan kualitas pengelolaannya. Dalam hal ini, seluruh pihak yang terlibat, mulai dari petugas administrasi, dokter, apoteker, hingga peserta JKN sendiri, memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga keberlangsungan program ini.

Dalam kesempatan yang sama, hadir pula perwakilan dari Kejaksaan Negeri Baubau, yakni Kepala Seksi Perdata dan Tata Usa-

ha Negara, Nova Aulia Pagar Alam, yang menyoroti pentingnya peran kejaksaan dalam mendukung BPJS Kesehatan, khususnya dalam aspek hukum. Nova menyatakan bahwa pihak kejaksaan siap bekerja sama untuk menindak segala bentuk kecurangan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan kejaksaan merupakan salah satu bentuk penguatan sistem hukum dalam mendukung kelangsungan program jaminan kesehatan nasional yang adil dan merata. Dalam konteks ini, peran kejaksaan bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun sistem yang lebih baik dan bebas dari praktik curang.

“Dengan pemahaman yang sejalan dan semangat kolaborasi yang kuat, kami yakin Program JKN akan semakin kuat dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita jaga integritas dan keberlangsungan program ini bersama-sama,” pungkasnya.

Tidak lupa hadir Asisten II mewakili Pemerintah Kota Baubau menjembatani sosialisasi dan diskusi yang dilaksanakan dan memastikan sosialisasi telah sampai kepada setiap satuan kerja yang hadir untuk ditindak lanjuti. (\*)

## Bupati Bersama Ketua DPRD Butur Terima Kunjungan Mahasiswa UGM Selaku TEP Kerjasama Kementerian Transmigrasi RI

agai dasar kebijakan, mengembangkan potensi lokal menjadi komoditas unggulan, memperkuat tata kelola masyarakat serta menghadirkan inovasi dan infrastruktur berkelanjutan.

Dalam kesempatan ini, Bupati Butur mengucapkan selamat atas kedatangan para Mahasiswa TEP di Kabupaten Butur, serta berharap agar para Mahasiswa tersebut betah dan dapat menyelesaikan tugas-tugasnya sampai dengan batas waktu yang ditentukan selama 4

bulan. “Semoga kehadiran TEP di Butur bisa melakukan mapping dengan baik di bidang infrastruktur maupun pemetaan dalam menggali potensi unggulan yang ada di wilayah transmigrasi,” ujar Bupati.

Selanjutnya, Bupati juga menegaskan pentingnya sinergi antara tim ekspedisi dengan perangkat daerah dalam mendukung pembangunan, khususnya di bidang transmigrasi.

Sebagai pimpinan di Daerah, Dirinya menghimbau kepada stake-

holder mulai dari OPD terkait, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, agar berpartisipasi dalam membantu memfasilitasi Tim Ekspedisi Patriot, agar tugas-tugas dan misi tim ini terlaksana dengan baik.

Diakhir sambutan, Bupati mengajak TEP untuk melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, utamanya kepada semua lapisan masyarakat yang ada di obyek penelitian.

Harapannya, hasil dari kerja-kerja TEP tersebut dapat memberi dampak dan manfaat yang baik bagi daerah tercinta Buton Utara. (\*)

## Kemenag dan Pemprov Sultra Luncurkan STQH Nasional 2025, Usung Tema Kerukunan dan Pelestarian Lingkungan

lainya syiar menuju perhelatan nasional pada 9â€19 Oktober 2025.

Wakil Gubernur Sultra, Hugua, menyatakan STQH menjadi momentum

strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya Bumi Anoa sekaligus memperkuat kerukunan masyarakat.

“Melalui momentum STQH tingkat

nasional, kami ingin menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara adalah daerah yang kaya budaya, adat istiadat, serta keragaman etnis dan agama yang hidup dalam

bingkai keharmonisan dan kerukunan yang kuat,” ujar Hugua.

Menumbuhkan Kecintaan pada Al-Qurâ€™an dan Hadis Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, As-

run Lio, mengungkapkan bahwa STQH tidak hanya menjadi ajang kompetisi, melainkan sarana membudayakan nilai Al-Qurâ€™an dan Hadis.

“Pelaksanaan STQH nasional bertujuan menumbuhkan kecintaan pada Al-Qurâ€™an dan Hadis, mewujudkan masyarakat religius yang harmonis dan toleran, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah,” jelas Asrun Lio.

Tahun ini, STQH mengusung tema “Syiar Al-Qurâ€™an dan Hadis, Merawat Kerukunan, Melestarikan Lingkungan.” Menurut Asrun Lio, tema tersebut mencerminkan pesan universal Islam yang berpadu dengan tantangan zaman, termasuk menjaga kerukunan sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Ribuan Peserta Siap Berkompetisi

Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag RI, Ahmad Zayadi, menyampaikan sebanyak 1.027 peserta telah lulus seleksi berjenjang dan siap tampil di tingkat nasional. Dari jumlah itu, 663 peserta menjadi peserta inti dan 364 lainnya sebagai peserta cadangan.

“Mereka akan berkompetisi dalam empat cabang utama,

yakni Seni Baca Al-Qurâ€™an, Hafalan Al-Qurâ€™an, Tafsir Al-Qurâ€™an Bahasa Arab, dan Musabaqah Hadis. Tahun ini juga hadir cabang baru yang sangat strategis, yaitu Karya Tulis Ilmiah Hadis,” terang Zayadi.

Ia menambahkan, kehadiran cabang baru tersebut menandai penguatan dimensi intelektual dalam syiar STQH. “Ini bukti bahwa penguasaan Al-Qurâ€™an dan Hadis tidak hanya diukur dari hafalan dan bacaan, tetapi juga dari pengembangan pemikiran dan intelektualitas generasi muda,” katanya.

Momentum Penguatan Moderasi dan Persaudaraan

STQH Nasional 2025 di Kendari dipandang bukan sekadar kompetisi keagamaan, melainkan wadah mempererat persaudaraan lintas daerah. Kehadiran ribuan peserta dari seluruh Provinsi diyakini akan menumbuhkan semangat ukhuwah sekaligus memperkuat harmoni kebangsaan.

Selain itu, penyelenggaraan STQH menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dan pusat dalam merawat toleransi, meningkatkan pendidikan keagamaan, serta menjadikan nilai Al-Qurâ€™an dan Hadis sebagai pedoman hidup di tengah tantangan global. (\*)

## Cirebon Timur Daerah Otonomi Baru di Jabar, Ada 16 Kecamatan



Ilustrasi. Cirebon Timur calon otonomi daerah baru.

### Laporan: Hadi

JAKARTA- DPRD dan Pemprov Jawa Barat telah menyetujui usulan Cirebon Timur sebagai calon daerah persiapan Otonomi Baru (CD-POB) dalam rapat paripurna.

Berdasarkan kajian, Cirebon Timur akan terdiri dari 16 kecamatan dengan luas wilayah 446,57 kilometer persegi. Kecamatan-kecamatan itu, yakni Astanajapura, Babakan, Ciledug, Gebang, Greged, Karangsembung, Karangwareng, Lemahabang, Losari, Pabedilan, Pabuaran, Pangenan, Pasaleman, Sedong, Susukan Lebak, dan Waled.

Soal lokasi ibu kota, masih ada dua kandidat kuat. Bupati Cirebon dan DPRD Kabupaten Cirebon memilih Kecamatan Karangwareng sebagai pusat pemerintahan. Sedangkan DPRD Jabar dan tim riset Unpad merekomendasikan Kecamatan Karangsembung.

Alasannya, Kecamatan Karangwareng memiliki

jalur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang dikhawatirkan akan menjadi kendala pembangunan di masa depan.

Selain penentuan ibu kota, wacana soal nama daerah juga muncul. Kajian menyebutkan, setelah resmi menjadi daerah persiapan otonomi baru, Cirebon Timur bisa dipertimbangkan berganti nama menjadi Caruban Nagari untuk memperkuat identitas lokal.

Berdasarkan hasil penilaian dengan enam indikator mulai dari kondisi geografis, tata ruang, ketersediaan lahan, hingga aspek sosial dan politik Cirebon Timur dinyatakan layak untuk menjadi daerah persiapan otonomi baru.

Dalam skala nasional, skor CDPOB Cirebon Timur berada di peringkat 6 dari 9 DOB yang telah diusulkan dengan nilai 351. Meski demikian, skor ini masih berpotensi meningkat karena penghitungan awal menggunakan data proksi.

Wacana zaman reformasi

Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono yang memimpin rapat paripurna persetujuan pengusulan CDPOB Cirebon Timur menegaskan, wacana pemekaran Cirebon Timur bukan hal baru dan sudah ada sejak zaman reformasi.

"Intinya Cirebon Timur itu aspirasinya sejak dulu, sejak zaman reformasi sudah muncul wacana pemekaran karena memang Cirebon luas sekali, 40 kecamatan, 424 desa dan kelurahan, jumlah penduduk juga sangat besar," ujarnya.

Menurut Ono, pemekaran ini akan menjadi tonggak baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendekatkan pelayanan publik. Ia juga menyinggung perlunya komitmen anggaran dari pemerintah provinsi maupun kabupaten induk.

"Sembari menunggu moratorium dicabut, saya yakin gubernur punya komitmen untuk bisa menyelesaikan tujuh perso-

lan. Instrumen APBD provinsi dan kabupaten induk harus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Cirebon Timur, dari mulai jalan, pendidikan, kesehatan," kata Ono.

Sementara Sekda Jabar Herman Suryatman menegaskan, pihaknya saat ini akan menunggu dicabutnya moratorium oleh pemerintah pusat. Sembari menunggu, Herman memastikan Pemprov Jabar akan kembali mengatasi berbagai persoalan yang ada di Cirebon Timur.

"Kami masih menunggu, tentu itu domain pemerintah pusat. Sambil menunggu kita manfaatkan untuk kroscek, baik demografi, geografi, sosial budaya, politik, ekonomi, kapasitas fiskal, maupun tata kelola pemerintahan. Mudah-mudahan setelah moratorium dibuka, Kabupaten Cirebon Timur bisa sesuai harapan," ujar Herman.

"Semua ini kami persembahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kualitas pembangunan, dan pemberdayaan, agar pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya," sambungnya.\*

Namun, dia bilang keduanya membahas soal situasi dan kondisi negeri. Menurut dia, Partai Demokrat ingin agar pemerintahan Presiden Prabowo sukses.

Bukan hanya untuk menyelesaikan berb-

agai tantangan Bangsa, namun dia juga ingin kerukunan tetap terjaga di tengah masyarakat.

"Tapi intinya ya membahas bagaimana kita bisa terus mengawal pembangunan negeri kita. Kita ingin pemerintahan

Presiden Prabowo Subianto sukses, kami semua ada di dalamnya dan tentunya kita juga berusaha sebaik mungkin bukan hanya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat,

tapi juga untuk menjaga kerukunan bangsa ini," kata dia.

Acara HUT Partai Demokrat diisi dengan dialog AHY dengan masyarakat umum. Turut hadir pada kesempatan itu SBY yang memberi-

## Komisi III DPR Buka Kans Dahulukan RUU Perampasan Aset dari RKUHAP



Komisi III DPR siap untuk mulai membahas RUU Perampasan Aset yang telah diusulkan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

### Laporan: Listar

JAKARTA-Komisi III DPR siap untuk mulai membahas RUU Perampasan Aset yang telah diusulkan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil berkata pihaknya akan mengikuti keputusan Baleg DPR. Dia memastikan pimpinan dan anggota Komisi III DPR tidak akan keberatan.

"Tentu kalau emang sikap dan pernyataan Baleg bahwa rencana pembahasan RUU Perampasan Aset bisa diserahkan ke Komisi III, tentu pimpinan dan anggota Komisi III akan siap menjalankan tugas itu," di kompleks parlemen, Rabu (10/9).

Nasir mengatakan pihaknya tak akan memperlumahkan

kan hal itu, kendati saat ini Komisi III juga tengah membahas revisi KUHAP. Menurut dia, kedua RUU itu bisa berjalan simultan atau justru RUU Perampasan Aset bisa didahulukan jika dirasa mendesak.

"Itu teknis [pembahasan]. Bisa paralel atau siapa yang didahulukan. Mana yang perlu diselesaikan atau perampasan aset," kata Nasir.

Namun legislator PKS itu enggan bicara lebih jauh soal substansi RUU tersebut. Dia menilai saat ini yang lebih penting adalah kehendak semua fraksi untuk mulai membahasnya.

"Soal substansi itu macam-macam pendapatnya. Karena macam-macam pendapatnya, saya pribadi lebih fokus kita tindak lanjuti terlebih dulu apa yang diharapkan Presiden," kata Nasir.

Dasco Temui Prabowo di Istana, Laporan Poin-poin Keputusan DPR

Sementara, usai diusulkan masuk Prolegnas Prioritas, Ketua Baleg DPR Bob Hasan berkata RUU Perampasan Aset siap untuk dibawa ke Paripurna pengesahan evaluasi Prolegnas pada pekan depan.

Dia bilang evaluasi Prolegnas Prioritas 2025 akan bersamaan dengan pengesahan daftar Prolegnas Prioritas 2026.

"Ke Paripurna itu hari Rabu [pekan depan] karena kita nanti mau mengusulkan yang prolegnas 2026, sekaligus," katanya.

Bob sebelumnya menyebutkan RUU Perampasan Aset yang akan menjadi usul inisiatif DPR akan dibahas di Komisi III DPR. Dia membuka peluang RUU Perampasan Aset akan dibahas bersama RKUHAP.\*



kan lukisan karya pribadinya kepada partai yang berulang tahun ke-24.

Lukisan itu bergambar sebuah kapal di lautan yang tengah menerjang badai dengan dominasi warna biru dan diberi nama "Only The Strong".

"Strong untuk menghadapi dan

melawan tantangan, ancaman, gangguan baik kepada orang, parpol dan negara. Setuju?" ujar SBY.

Menurut dia, ada tiga hal untuk tetap menjadi kuat, yakni courage, togetherness, dan leadership. SBY mengajak semua kader Partai Demokrat menjadi kuat dan tak takut

menghadapi tantangan dan ancaman.

"So, mari kita menjadi the strong dan ketika menghadapi tantangan jangan takut, jangan gamang, jangan menyerah, dengan keberanian, kebersamaan, dan kepemimpinan, insyallah akan berhasil," ujarnya.\*

## Resmi Dilaunching, Ini Makna Filosofi Logo STQHN ke-28 Tahun 2025 di Sultra



**Pewarta: Lisna**

SULTRA, BP- Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits Nasional (STQHN) ke-28 Tahun 2025 resmi dilaunching oleh Wagub Sultra, Hugua bersama, Direktur Penerangan Agama Islam Direktorat Penais Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Kakanwil Kemenag Sultra, H. Muhamad Saleh, Sekda Sultra, Ketua DPRD Sultra dan Asisten Deputi Bina Keagamaan Kemenko PMK, di hotel Azizah Sya-riah Kendari. Selasa (9/9/2025).

Hadir, Bupati dan Walikota se Sultra, Forkopimda Sultra, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov. Sultra, Rektor UHO, Rektor IAIN Kendari, Pimpinan Instansi/Lembaga Vertikal Sultra, Kasubdit LPTQ, Pejabat Administrator Kanwil Kemenag Sultra, Ketua Umum MUI Sultra, Kakanwil Kemenag Provinsi, Kepala Biro Kesra dan Ketua LPTQ Provinsi se Indonesia, Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota se Sultra, Kepala Madrasah, Kepala KUA dan Pimpinan Perbankan se Kota Kendari, Pimpinan Ormas Islam, Tokoh Agama serta tamu undangan lainnya.

Setelah 33 tahun menunggu giliran, Prov. Sulawesi Tenggara akhirnya di-

dapuk sebagai tuan rumah penyelenggara STQHN ke-28 Tahun 2025 yang mengusung tema "Syiar Al Qur'an dan Hadits Merawat Kerukunan Melestarikan Lingkungan".

Launching perhelatan akbar yang akan digelar pada tanggal 8 hingga 19 Oktober 2025 mendatang ini, direncanakan akan dibuka secara langsung oleh Presiden RI pada 11 Oktober 2025 mendatang, dan direncanakan ditutup oleh Wakil Presiden RI pada 18 Oktober 2025. Selain itu, STQHN ke-28 akan dihadiri 1.027 peserta dari seluruh Indonesia. Diperkirakan akan ada undangan VVIP sebanyak 206 orang dan undangan VIP 796 orang, serta kafilah berjumlah 2.280 orang, sehingga total keseluruhan berjumlah 3.282 orang.

Jelang pelaksanaan STQHN ini, Kakanwil Kemenag Sultra, H. Muhamad Saleh yang ditemui usai Launching STQH Nasional ke-28 Tahun 2025, me-nyatakan Sultra telah siap menjadi tuan rumah dan menyuk-seskan STQH Nasional di Sultra, serta memberikan yang terbaik kepada para tamu yang berasal dari seluruh penjuru Nusantara.

"Kanwil Kemenag Sultra bersama Pem- prov, siap menyuk- seskan penyelengga-



raan STQH Nasional ke-28 Tahun 2025. Kita berharap, semoga STQHN di Sultra tidak hanya sukses pelaksanaan, namun juga sukses prestasi," pungkasnya.

STQHN ke-28 yang dipusatkan di Kota Kendari ini, akan menggunakan enam titik lomba atau venue. Pertama, Tugu Persatuan Sultra sebagai arena utama dan tempat lomba tilawah anak-anak dan dewasa.

Kedua, Aula Kampus IAIN Kendari sebagai tempat lomba hafalan Alquran 1 juz dan tilawah serta 5 juz. Ketiga, Aula Inspektorat Sultra akan digunakan sebagai tempat lomba hafalan Al-Quran. Keempat, Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sultra sebagai tempat lomba hafalan Al-Quran 30 juz dan tafsir bahasa Arab.

Kelima, Aula Dinas Pendidikan sebagai tempat lomba hafalan 100 hadits dan 500 hadits, serta keenam Aula Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara akan digunakan sebagai tempat lomba karya tulis ilmiah hadits. Selain itu, Aula Asrama Haji Kendari, akan menjadi tempat pendaftaran ulang peserta.

Sedangkan logo STQH Nasional ke-28 yang telah resmi dilaunching, memiliki makna filosofi yang kental, mencerminkan jatidiri Sul-

tra sebagai tuan rumah penyelenggara STQHN ke-28 Tahun 2025. Adapun makna filosofi dari Logo STQHN ke-28 Tahun 2025 yaitu :

Simbol Quba merupakan simbol masjid sebagai tempat ibadah umat Islam dan warna emas menjadi simbol keagungan dan kemuliaan nilai-nilai ajaran Islam.

Simbol Tugu Persatuan Sultra, sebagai simbol persatuan masyarakat Sultra yang hidup dalam keragaman suku, budaya dan agama.

Simbol Pencerahan, yang terpancar dari nilai-nilai ajaran Al-Qur'an dan Hadis, dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang religious.

Mushaf Al-Qur'an dan Al Hadis sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat manusia.

Simbol Tipografi dan Tahun pelaksanaan STQH XXVIII di Sulawesi Tenggara.

Simbol Tangan Berdoa, untuk keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa Indonesia.

Kemeriahan STQH Nasional ke-28 di Sulawesi Tenggara, nantinya akan dikeng- kapi dengan Pawai Taaruf kendaraan hias yang dimulai atau start dari lapangan Benubenua hingga finish di depan Kantor Walikota Kendari, serta Pameran mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2025. (\*)

## Kemenag RI dan Pemprov Sultra Matangkan Persiapan STQH Nasional ke-28 di Kendari



**Pewarta: Nandar**

SULTRA, BP- Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mem- matangkan persiapan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadis (STQH) Nasional XXVIII Tahun 2025 yang akan digelar di Kota Kendari, 9 Oktober 2025 mendatang. Rapat koordinasi persiapan berlangsung di Ruang Audit Corner Kanwil Kemenag Provinsi Sultra, Rabu (10/9/2025).

Hadir dalam rapat tersebut Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama RI, Ahmad Zayadi, beserta jajaran, Kepala Kanwil Kemenag Sultra H. Muhamad Saleh, Kepala Dinas Cipta Karya Sultra, Kepala Biro Kesra Setda Sultra, serta sejumlah pejabat terkait.

Dalam arahnya, Kepala Kanwil Kemenag Sultra, H. Muhamad Saleh, meng- e- gaskan pentingnya sinergi semua pihak untuk memastikan kesiapan penyeleng- garaan STQH tinggal menghitung hari.

"Pertemuan ini sangat penting karena kita ingin memasti- kan seluruh persiapan, baik teknis maupun strategis, benar-benar matang. Waktu pelak- sanaan tinggal satu bulan lagi, sehingga perlu ada langkah konkret untuk meny- empurnakan segala persiapan," ujarnya.

Sementara itu, Di- rektur Penerangan Agama Islam Ke- menag RI, Ahmad Zayadi, menyampai- kan bahwa STQH dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan instrumen kebijakan negara.

"STQH dan MTQ adalah instrumen ke- bijakan negara. Tidak hanya untuk syiar, tetapi juga sebagai wasilah ukhuwah. Kita berharap STQH men- jadi instrumen rekonsi- liasi sosial nasional, menghadirkan semang- at persatuan dari nilai-nilai Qur'an, dan tegasnya.

Zayadi juga menekankan bahwa Kemenag bersama pemerintah daerah berkomitmen menjaga kualitas penyeleng- garaan STQH. Salah satunya melalui proses penetapan peserta yang sangat ketat.

"Kemenag telah menetapkan 1.027 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia sebagai kafilah STQH Nasional. Penetapan ini dilakukan bersama Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan peserta benar-benar mewakili daerah asalnya. Tidak ada lagi kasus peserta tiba-tiba memperkuat daerah lain," un- kapnya.

Dari sisi teknis, ber- bagai fasilitas pendu- kung juga dipastikan siap. Enam rumah sakit rujukan 24 jam, tim medis, ambulans, serta dukungan dari 10 apotek akan di- siagakan di setiap are- na lomba. Selain itu, kesiapan infrastruktur seperti pengamanan, pemadam kebakaran, sarana penunjang, hingga jaringan in- ternet telah ditata agar penyelenggaraan STQH berjalan lancar.

"Kita ingin me- mastikan seluruh in- frastruktur pendukung berjalan maksimal sehingga STQH ber- langung sukses dan lancar," tambah Za- yadi.

Lebih jauh, ia me- nyampaikan harapan agar STQH Nasional XXVIII di Kendari ti- dak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan,

tetapi juga memberi- kan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Oleh karena itu, kita berharap STQH Nasional XXVIII di Kendari dapat ber- jalan lancar dengan akuntabilitas tinggi dan kualitas terbaik dari seluruh pengala- man penyelenggaraan sebelumnya. Dengan akuntabilitas yang kuat, kita bisa mera- sakan betapa objekti- vitas dan kualitas pe- nyelenggaraan mampu memperluas pembi- naan Al-Qur'an secara merata," jelasnya.

Selain sebagai ajang syiar Islam, STQH juga diproyeksikan memberi dampak ekonomi yang signifi- kan, khususnya bagi produk-produk lo- kal. Kehadiran ribuan peserta dan tamu dari seluruh provinsi akan menggerakkan sektor perhotelan, transpor- tasi, kuliner, hingga perdagangan masyara- kat Sulawesi Tenggara.

"Momentum ini juga kesempatan terbaik bagi pemerintah daerah untuk menampilkan hasil-hasil pembangunan. Dengan kerukunan dan keamanan yang terjaga, Sultra siap menjadi tuan rumah yang baik. Untuk itu, para kepala dinas dan pejabat ter- kait bersama Kemenag RI dan Pemprov Sultra diminta bekerja sama secara total guna me- nyukseskan penyeleng- garaan STQH, baik dari sisi sistem perencanaan maupun pelaksanaan. Kesuksesan ini hanya bisa dicapai melalui kolaborasi dan tang- gung jawab bersama," pungkasnya.

Dengan persiapan yang terus dimatang- kan, STQH Nasional XXVIII di Kendari di- harapkan tidak hanya sukses sebagai event keagamaan, tetapi juga sebagai momentum memperkuat persatuan bangsa dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. (\*)

## Bupati Butur Afrudin Mathara Buka Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/2025 Sampaikan Pesan Sikap Saling Menghormati dan Berjiwa Damai



### Laporan : Kasrun

BUTUR, BP-Bupati Buton Utara (Butur) Afrudin Mathara, SH., MH. membuka acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, 12 Rabi'ul Awwal 1447 H/ 2025 M di pelataran Rumah Jabatan Bupati (Kamali) Kecamatan Kulisusu, Jum'at (5/9/2025).

Acara ini digelar dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan seluruh umat Muslim di dunia, Rasul Allah, yang juga merupakan pemimpin umat manusia, yang memiliki banyak keteladanan serta inspirasi untuk kita ikuti, baik dalam aspek sosial, ibadah ritual, maupun dalam aspek kehidupannya.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, selain sebagai sarana untuk memperkuat tali ukhuwah yang telah terbangun dengan baik selama ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga hendaknya dapat dijadikan momentum memperkuat kecintaan kita terhadap Baginda Rasulullah SAW.

Ia mengatakan, sebagai daerah dengan

masyarakat yang plural, keteladanan atas sikap Rasulullah hendaknya dapat diwujudkan dengan senantiasa mengembangkan sikap saling menghormati, berjiwa damai serta bertoleransi dengan saudara kita yang beragama dan bersuku lain.

"Kami optimis jika seluruh sisi kehidupan Rasulullah dapat kita teladani, kita ikuti dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kedepannya kita pasti akan menjadi ummat yang beruntung, beriman, bertaqwa, adil, makmur dan sejahtera," ujar Bupati Afrudin.

Pada momentum tersebut, Ia mengajak seluruh umat muslim yang ada di Kabupaten Butur untuk berdoa memohon kebaikan bagi daerah tercinta Buton Utara "Lipu Tunadeakono Sara."

"Melalui Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam malam ini, mari bersama-sama kita berdo'a dan bermohon kepada Allah Subhanahu Wata'ala agar daerah kita ini menjadi negeri yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur, negeri yang bermarwah, amanah, maju,

adil, dan sejahtera dirajaukan dari segala macam musibah, bala, bahaya serta ancaman yang dapat meruntuhkan rasa persaudaraan, persatuan dan kesatuan di antara kita," ucapnya.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran (QS. Al-Ahzab: 21), yang artinya: "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap Rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak mengingat Allah."

Oleh karena itu, untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW dan menyebarkan cinta pada umat muslim, kita harus mengikuti dan mengamalkan sunnahnya, terutama sifat-sifat mulia seperti jujur (sidiq), dapat dipercaya (amanah), cerdas (fathonah) dan menyampaikan risalah (tabligh).

Selain itu, sebagai wujud rasa cinta terhadap Rasulullah dapat kita lakukan melalui tindakan nyata seperti bersedekah, bersholaawat, menunjukkan kasih sayang dan menawarakan persatuan yang semuanya merupakan wujud kepedulian dan

mencerminkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

Pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/ 2025 M tahun ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Butur juga mengadakan Lomba Pohon Telur (Male), dengan kriteria penilaian Pohon Male terbaik, kesesuaian tema, tata hidangan terbaik, kreativitas serta juara favorit.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Buton Utara, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Butur, Forkopimda, Para Staf Ahli dan Asisten Lingkup Setda Butur, Para Kepala OPD Butur, Kepala Kantor dan Instansi Vertikal, Kepala Kantor Kemenag Butur, Ketua TP-PKK Kabupaten Butur beserta Anggota, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Butur beserta Anggota, Ketua BKMT Kabupaten Butur beserta Anggota, Ketua MUI Butur, Ketua Baznas Butur, Ketua NU Butur, Camat Kulisusu, Para Lurah dan Kepala Desa Kecamatan Kulisusu, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat. (\*)

## Pemkab Butur Laksanakan GPM Serentak Via Zoom Meeting Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Harga Pangan Serta Meriahkan HUT RI Ke-80



BUTUR, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau "Pasar Murah" di Lapangan Raja Jin Kecamatan Kulisusu, Sabtu (30/8/2025), yang dilaksanakan serentak via Zoom Meeting di seluruh Kabupaten dan Kota se-Indonesia.

Gerakan Pangan Murah serentak tersebut dilaksanakan dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan serta memeriahkan Hari

Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke-80, yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog, dan diikuti oleh 7285 Kecamatan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia.

Pasar murah yang dilaksanakan di Lapangan Raja Jin tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara, Muhammad Hardhy Muslim, SH.,M.Si.

dan turut hadir Ketua DPRD Butur Hj. Hasrianti Ali, ST.,M. Si., Asisten Perencanaan dan Pembangunan sekaligus Plt. Kadis Pertanian Sahrun Akri, ST.,M.Si., Asisten Pemerintahan dan Kesra sekaligus Plt. Kadis Koperasi dan UMKM, Mansur, S.Sos.,M.Si., Kadis Ketahanan Pangan, Sadaria, SP., Plt. Kadis Perindag, Plt. Kasat Pol PP, Forkopimda, serta Instansi terkait dan Camat Kulisusu. (\*)



pada masyarakat. Ia mengingatkan para kepala desa agar tidak terjebak dalam kepentingan politik menjelang pemilihan kepala desa.

"Jangan lagi terkotak-kotakan. Sekarang fokus membangun desa, pilkades masih dua tahun lagi. Jalankan visi dan misi pemerintah daerah agar setiap program desa berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Dari total 17 desa yang seharusnya mendapat perpanjangan masa jabatan, empat kepala desa tidak ikut dikukuhkan karena mengundurkan diri untuk maju sebagai calon legislatif maupun menjadi ASN. Keempat desa tersebut yakni Lalibo dan Watorumbe (Keca-

matan Mawasangka Tengah), Batubana-wa (Kecamatan Mawasangka Timur), serta Lakapera (Kecamatan Gu). Pemerintah daerah akan menunjuk pejabat kepala desa untuk mengisi kekosongan tersebut agar roda pemerintahan tetap berjalan.

Adapun 13 kepala desa yang dikukuhkan adalah:

1. Sahrul Asmi, S.Pi (Desa Lolibu)
2. Sahiruddin (Desa Kancebung)
3. Yasman (Desa Kolowa)
4. Saharia (Desa Baruta Analalaki)
5. Nuzula, S.Ag (Desa Bungi)
6. La Daheru (Desa Oengkolaki)
7. H. Samsul Zinu (Desa Waara)
8. La Udi (Desa Bantea)
9. Mardin (Desa Langkomu)

10. Abidin, S.Pd (Desa Matara)

11. Irwan (Desa Matawine)

12. Muhammad Ridwan Ota Putra, S.Pd (Desa Baruta)

13. Laudin (Desa Wantopi)

Melalui pengukuhan ini, Pemkab Buton Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembangunan desa berkelanjutan, menjaga stabilitas pemerintahan desa, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi program pembangunan daerah sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Buton Tengah. (\*)

## Pemkab Buton Tengah Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan 13 Kepala Desa Periode 2025-2027

### Pewarta: Rahim

BUTENG, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah resmi mengukuhkan perpanjangan masa jabatan kepala desa periode 2017-2023 untuk melanjutkan kepemimpinan pada peri-

ode 2025-2027. Prosesi pengukuhan berlangsung di Aula Pancana, Lantai V Kantor Bupati, Jumat (29/8/2025), dipimpin langsung oleh Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si.

Acara ini dihadiri jajaran pemer-

intah daerah, anggota DPRD Buton Tengah, Plt. Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, para kepala desa, serta tamu undangan lainnya. Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.3/4179/

SJ tanggal 31 Juli 2025 sebagai payung hukum perpanjangan masa jabatan.

Dalam sambutannya, Bupati Azhari menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan mengutamakan pembangunan desa yang berpihak ke-

## Hebat, SDN 3 Kotebengke Baubau ke Tingkat Nasional Pada Lomba FLS3N Bawakan Tari Sala Mbolio



Laporan: Firman

BAUBAU, DT - Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS3N) yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) pada siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Tari Sala Mbolio yang dibawakan siswa SDN 3 Kotebengke Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk ke tingkat Nasional.

Sebelumnya, SDN 3 Kotebengke meraih juara 1 Lomba kreasi tingkat Kabupaten dan Kota, kemudian lolos ke tingkat provinsi

dan sekarang menuju tingkat Nasional.

Kepala SDN 3 Kotebengke, La Jabi mengatakan, ada 38 provinsi yang mengikuti berbagai macam lomba FLS3N secara daring. SDN 3 Kotebengke Kota Baubau salah satu yang lolos untuk tingkat Nasional yang membawakan Tari Sala Mbolio.

"Jadi, untuk mewakili provinsi Sulawesi Tenggara ke tingkat Nasional SDN 3 Kotebengke dan sekarang dalam tahap penyisihan," beber La Jabi saat ditemui disekolah, Selasa (9/9/2025).

La Jabi menjelaskan,



kan, Tari Sala Mbolio yang dibawakan Tiga orang siswanya yakni, Nadia, Rahma Yanti, dan Nuralhayyu Rahmadhani merupakan tari kreasi yang terinspirasi dari kehidupan anak-anak didaerah Lipu Kotebengke dan Labuantea pada masa lampau.

"Tarian ini (Tari Sala Mbolio), menggambarkan suasana kebersamaan mereka saat bermain sambil membantu orang tua yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan nelayan," tutur La Jabi.

La Jabi menambahkan, Tari Sala Mbolio digambarkan aktivitas anak-anak yang men-

cabut gulma (tanaman mengganggu), membersihkan ranting, dedaunan, dan batu-batu kecil, kemudian memasukan ke dalam keranjang sambil melantunkan syair lagu.

"Tari Sala Mbolio menjadi sarana untuk memperkenalkan dan melestarikan kearifan lokal budaya Kota Baubau, khususnya di Lipu Kotebengke dan Labuantea, dengan mengemas aktivitas keseharian anak-anak di masa lalu ke dalam bentuk tari kreasi yang penuh makna," tutup Kepala Sekolah SDN 3 Kotebengke. (\*)

## Irama Laut Buton Hilirisasi Ekonomi Biru Berbasis Kearifan Lokal Dan Teknologi.

**JELITA SRI RAHAYU**  
(Penulis Adalah Mahasiswa Universitas Muslim Buton Prodi Peradilan Pidana)



BUTON-Indonesia menargetkan Indeks Ekonomi Biru (IBEI) naik dari 60,57 di tahun 2023 menjadi 88,57 pada 2045, menandai ambisi besar dalam memperkuat ekonomi kelautan yang berkelanjutan, sejalan dengan pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan

Pendekatan ekonomi biru yang mengedepankan keberlanjutan ekosistem berpotensi menjadi penyeimbang hilirisasi sektor pertambangan yang disebut sebagai sektor ekstraktif dengan memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya pesisir sebagai bagian dari pilar-pilar IBEI.

Dalam konteks Forkestra 2025 yang mengunggulkan inovasi, ketahanan, dan keberlanjutan, hilirisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya laut. Buton memiliki peluang besar untuk mengembangkan model hilirisasi berbasis ekonomi biru yang mengintegrasikan kearifan lokal dan teknologi digital. Dengan demikian, penguatan sektor kelautan tidak hanya soal produksi, tetapi juga tentang pelestarian budaya dan ekologi.

Artikel ini memuat ringkasan umum karya ilmiah yang ditulis Jelita Sri Rahayu Mahasiswa Universitas Muslim Buton Prodi Peradilan Pidana dalam lomba Forkestra yang digelar oleh Bank Indonesia Cabang Sulawesi Tenggara.

Relevan untuk menjawab tantangan degradasi lingkungan, rendahnya nilai tambah produk laut, serta minimnya literasi teknologi di pesisir.

Fakta Kunci hasil perikanan sumber DKP Produksi laut (2023) meliputi:

- \* Ikan Pelagis: 18,90 ton
- \* Rumpuk Laut: 60,17 ton
- \* Kepiting dan Rajungan: 120,72 ton
- \* Kerang Mutiara: 188,75 ton
- \* Hasil Budidaya Lain :

262.24 ton

### Menemukan Potensi ekowisata bahari tinggi berbasis konservasi

Kearifan lokal seperti *â€œsando-sandoâ€* dan gotong royong maritim mendukung hilirisasi inklusif sebagai. Strategi Hilirisasi Buton dalam konteks Forkestra 2025 *â€œ* berikut strategi utama yang diusulkan:

1. Rumah produksi komunal hasil laut
2. Branding budaya lokal
3. Sertifikasi ekolabel
4. Digitalisasi pemasaran
5. Kolaborasi quadruple helix

Sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sebagai fondasi bersama.

Dampak dan Manfaat yang Diharapkan: Pendapatan nelayan dan UMKM meningkat. Nilai tambah lokal lebih kuat, pendapatan kian berdaya.

Pelestarian ekosistem laut Area mangrove, terumbu karang, dan lamun mendapatkan dukungan konservasi kuat.

Regenerasi pelaku ekonomi maritim muda Menumbuhkan generasi baru yang fasih teknologi dan sadar lingkungan.

Penguatan identitas budaya maritim Buton Membangun citra daerah sebagai pusat ekonomi biru berbasis kearifan dan inovasi.

### Penutup yang Memperkuat Posisi Buton

Melalui Forkestra 2025, strategi ekonomi biru Buton dapat diperkuat melalui kolaborasi multi-pihak, pemanfaatan teknologi digital, dan integrasi kelembagaan untuk memperluas pasar global. Pendekatan hilirisasi berbasis hati, budaya, dan alam akan menjadi identitas sekaligus daya saing Buton dalam perancangan ekonomi biru nasional. Dengan menggabungkan inovasi, kearifan lokal, dan komitmen keberlanjutan, Buton berpotensi menjadi model pembangunan maritim yang selaras dengan visi Forkestra 2025: Sulawesi Tenggara

## SKB Perizinan Tenaga Medis Jadi Tonggak Layanan Publik Digital yang Cepat, Aman, dan Transparan

JAKARTA - Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antar kementerian dan lembaga terkait penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) menjadi tonggak penting transformasi pelayanan publik di Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya mendukung penuh implementasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) untuk perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan di ka-

bupaten/kota.

Ia menekankan bahwa digitalisasi layanan publik harus menghadirkan kenyamanan, transparansi, dan bebas dari praktik korupsi dengan menghadirkan suasana pelayanan yang modern seperti di Bandung, di mana ruangnya nyaman, petugas ramah, layanan cepat, serta seluruh proses tercatat, terpantau, dan pembayaran hanya melalui outlet resmi sehingga potensi pungli dapat ditekan.

"Dengan sistem digital, potensi korupsi bisa ditekan karena semuanya transparan, terpantau, dan pem-

bayaran jelas melalui outlet. Layanan publik harus sederhana, cepat, dan bebas pungli," tegasnya.

Ia juga mengingatkan adanya tantangan besar di tingkat daerah, terutama terkait infrastruktur teknologi informasi dan keterbatasan fiskal. Oleh karena itu, menurutnya, implementasi harus dilakukan bertahap melalui daerah percontohan sebelum direplikasi ke seluruh wilayah.

Menteri PANRB Rini Widyantini menambahkan bahwa penerapan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan

melalui MPP Digital memberikan dampak nyata. Proses yang sebelumnya memakan waktu lebih dari dua minggu kini bisa diselesaikan dalam hitungan jam, dengan data yang langsung terintegrasi.

"Dari aspek waktu, persyaratan, biaya, akurasi, hingga sertifikasi, semuanya kini lebih sederhana. Masyarakat mendapatkan layanan lebih cepat, pemerintah daerah lebih efisien, dan pemerintah pusat bisa memantau secara real-time," jelas Rini.

Dari sisi keamanan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pemimpin Umum : Fauzan NWA  
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi  
Redpel : Hengky TA  
Korlip : Hengky T.A  
Redaktur : Alyakin, Kasrun  
Reporter : Rahim, Mashuri, Jaya, Azis, Lisna, Hafis, Harman Momi, Firman, Amat Jr

Layouter : Rlirin  
Pracetak : Aditya  
Cetak : Jamal

Penerbit : PT. Faren Grafika  
Komisaris : Erna Agule  
Direktur Utama : Andina Latief, SKM  
Manager Keuangan : Nabila D.A  
Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan  
Kepala Sirkulasi : Jamal  
Administrasi : Salvana  
Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman  
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan  
Kepala Biro Buton : Rahman  
Kepala Biro Busel : Salvana  
Kepala Biro Buteng : Andini  
Kepala Biro Bombana :  
Kepala Biro Sultra :

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr  
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,  
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya  
Agen Pasarwajo :  
Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,  
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,  
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1  
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau  
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com  
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

**Baubau Post**

Kritik, Lugas, Independen

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik. Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

## Menko Yusril Respons Langkah TNI Bidik Pidana Ferry Irwandi

Pewarta: Alwan

MAKASSAR - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasaran, Yusril Ihza Mahendra merespons langkah TNI yang mempertimbangkan akan mengambil langkah hukum terhadap CEO Malaka Project, Ferry Irwandi.

"Itu kasus lain ya. Itu nanti saja lah kita jawab ya, saya enggak menjawab kasus itu. Dan itu memang ada masalah di TNI dan mereka sudah meminta pandangan kepada Polri, ya kita lihat saja perkembangannya," kata Yusril kepada wartawan di Makassar, Rabu (10/9).

Menurut Yusril, pihaknya baru akan bersikap setelah ada laporan resmi yang diteruskan kepada kementerian maupun lembaga terkait.

"Nanti ujung-ujungnya juga akan disampaikan kepada kami, juga kepada Kementerian Hukum dan Kementerian Koordinator yang menangani masalah hukum," ujarnya.

Yusril mengatakan akan segera melakukan analisa dan menyarankan langkah-langkah dalam penyelesaian perkara kalau TNI resmi mempolisikan Ferry Irwandi.

"Saya kira nanti akan disampaikan,



Yusril respons langkah TNI terhadap influencer Ferry Irwandi.

kalau memang nanti sudah disampaikan kita akan analisis dan memberikan satu saran bagaimana menyelesaikan hal itu," jelasnya.

Sebelumnya, rencana pelaporan itu diawali kedatangan Dansatsiber TNI Brigjen Junta Omboh Sembiring, Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto, Kapuspem TNI Brigjen Freddy Ardianzah, ke Polda Metro Jaya pada Senin (8/9).

Sembiring menjelaskan dalam kunjungannya itu mereka berkonsultasi terkait dugaan tindak pidana Ferry Irwandi yang ditemukan dari hasil patroli siber.

"Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli siber terdapat, kami temukan beberapa fakta-fakta dugaan

tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi," jelasnya.

Terbaru, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Freddy Ardianzah menyinggung adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pencemaran nama baik tidak bisa dilaporkan institusi.

"Dengan adanya keputusan MK 105/2024 tersebut, TNI juga akan menimbang secara cermat langkah-langkah hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Freddy saat dihubungi, Rabu (10/9).

Ia menjelaskan pada Senin lalu, TNI masih dalam tahap konsultasi hukum dengan Polda Metro terkait pernyataan maupun tindakan Ferry Irwandi.

Di tempat yang sama Yusril merespons desakan sejumlah pihak agar Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta (TPF) terkait demonstrasi berujung kerusuhan yang terjadi September lalu.

Menurut Yusril, pemerintah saat ini telah mengambil langkah hukum yang konkret sehingga pembentukan TPF dinilai tidak mendesak.

"Ya, kita dengarkan dan kita simak baik-baik apa yang menjadi usulan dan saran dari rakyat kita tentang hal ini. Biasanya tim pencari fakta itu dibentuk kalau memang tidak ada langkah nyata dan konkret yang dilakukan oleh pemerintah," kata Yusril.

"Langkah hukum lah yang harus ditempuh, dan sejak itu semua bergerak," tambahnya.

Yusril menuturkan sudah melakukan pengecekan langsung di Polda Metro Jaya untuk memastikan penanganan hukum berjalan. Hingga kini, sebanyak 68 orang telah diamankan dan ditahan terkait kerusuhan tersebut.

"Faktanya sudah ada, bukti-bukti sudah ada, pelakunya sudah ditangkap. Jadi langkahnya itu lebih konkret dilakukan daripada membentuk tim yang masih mencari-cari," jelasnya. (\*)

## KPK Dalam Khalid Basalamah Pilih Haji Khusus Meski Sudah Bayar Furoda



### Laporan: Hadi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keputusan pendakwah sekaligus pemilik agensi perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah yang memilih menunaikan ibadah haji pada tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi dengan memakai kuota khusus, meskipun sudah membayar dan siap naik haji lewat jalur furoda.

"Didalami. Itu didalami," ujar Pelaksana Tugas Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Ketika ditanya mengenai pendalaman yang dilakukan KPK turut membahas keputusan Khalid Basalamah dilatarbelakangi faktor ekonomis atau tidak, Asep menyarankan agar pertanyaan tersebut langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan.

"Kalau ke sini (KPK, red.) lagi, nanti ditanya, 'Pak, lebih murah ya?' (alasan lepas furoda meski sudah bayar, dan memilih haji khusus, red.)," katanya.

Walaupun demikian, Asep menjelaskan penyidik KPK mendapatkan informasi bahwa pada tahun keberangkatan haji tersebut tidak ada haji furoda, tetapi hanya ada kuota haji khusus yang merupakan hasil pembagian dari 20.000 kuota tambahan pemberian Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia.

anak," katanya.

Meski demikian, putusan Ambo Ala yang berperan sebagai pembuat uang palsu tersebut terbilang ringan. Pasalnya, pada sidang tuntutan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa selama enam

"Akan tetapi, yang jelas tersedia saat itu adalah kuota haji khusus karena pembagian yang 20.000 itu 10.000 haji reguler dan 10.000 haji khusus. Kuota haji khusus menjadi lebih banyak karena seharusnya hanya 1.600 atau delapan persen dari 20.000," katanya.

Sebelumnya, Khalid Basalamah saat diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, Selasa (9/9) lalu, mengaku dirinya merupakan jemaah haji furoda yang sudah bayar dan siap berangkat menunaikan ibadah haji.

"Akan tetapi, ada seseorang bernama Ibnu Mas'ud yang merupakan pemilik PT Muhibbah (PT Muhibbah Mulia Wisata, red.) dari Pekanbaru, menawarkan kami visa ini, sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia di Muhibbah. Jadi, kami terdaftar sebagai jemaah di situ," katanya saat memberikan keterangan setelah diperiksa KPK.

KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil

Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (\*)

## Pencetak Uang Palsu UIN Makassar Divonis 4 Tahun Penjara

MAKASSAR - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menjatuhkan vonis selama 4 tahun terhadap terdakwa perkara pabrik uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Ambo Ala selama empat tahun penjara.

Ketua majelis hakim, Dyan Martha Budhinugraeny dalam amar putusannya menegaskan bahwa Ambo Ala terbukti melakukan



tindak pidana secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1.

"Menjatuhi pidana penjara selama 4 tahun terhadap terdakwa," kata

Dyan, Rabu (10/9).

Tak hanya itu, majelis hakim juga menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 50 juta kepada terdakwa akibat perbuatannya membuat uang palsu.

"Terdakwa didenda Rp50 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti

pidana kurungan 1 bulan," ujarnya.

Vonis tersebut berdasarkan pertimbangan majelis hakim terhadap terdakwa yang telah menyesali perbuatannya.

"Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 4 orang

tahun penjara.

Dalam kasus pabrik uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Ambo Ala memiliki peran sebagai pencetak uang palsu dengan memiliki keahlian menanam pita pada lembaran kertas.

Sebelumnya, jaksa juga telah membacakan tuntutan 8 tahun penjara terhadap terdakwa utama kasus pencetakan uang palsu jaringan kampus UIN Alauddin Makassar, Annar Salahuddin Sampe-toding. (hadi)

## Ketua TP PKK Baubau Tutup Pelatihan Asistensi Pembuat Pakaian dan Uji Kompetensi



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Ketua TP PKK Kota Baubau Hj Aryati Yusran menutup secara resmi pelatihan asistensi Pembuat Pakaian dan Uji Kompetensi Rabu (10/09/2025).

Dalam sambutannya, Hj Aryati Yusran mengungkapkan, Pemerintah Kota Baubau sangat peduli terhadap upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu modal Pembangunan daerah. Beberapa hal yang dihadapi Kota Baubau, khususnya sektor ketenagakerjaan antara lain adalah masih tingginya angka pengangguran, yang masih membutuhkan perhatian semua

meskipun angkanya cenderung turun. Sehingga Perlu pembukaan lapangan usaha yang seluas luasnya melalui investasi yang berkelanjutan.

Menurutnya, Pelatihan dan Uji Kompetensi menekankan pada tujuan pemberian keterampilan praktis dan pengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas individu, mempersiapkan peserta memasuki dunia kerja, serta mengevaluasi hasil pembelajaran melalui Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Profesional untuk mendapatkan sertifikasi.

“Penyelenggaraan kegiatan ini adalah merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Baubau untuk meningkatkan

keterampilan dan pengetahuan, meningkatkan tenaga kerja, dan mengembangkan potensi individu,”ujarnya.

Ditambahkan, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai bentuk pemberdayaan pencari kerja yang akan menginisiasi mereka untuk membuka usaha dengan dasar keterampilan yang telah diperoleh sehingga secara langsung dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Baubau.

Hj Aryati Yusran mengajak para peserta untuk mengamalkan keterampilan yang telah diperoleh guna meningkatkan kesejahteraan keluarga, baik untuk kebutuhan pribadi, hingga mengembangkan po-

tensi usaha mandiri seperti jasa jahit, serta aktif berkontribusi pada program-program PKK lainnya, seperti yang tertuang dalam 10 Program Pokok PKK. Membagikan Pengetahuan kepada masyarakat lainnya yang belum memiliki keterampilan untuk belajar menjahit, sehingga pengetahuan dapat tersebar dan semakin banyak ibu-ibu yang memiliki keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Memperkuat Jaringan dan Kolaborasi dengan sesama peserta pelatihan dan anggota TP PKK lain untuk saling mendukung dan mengembangkan potensi bersama. (\*)

## Perkemahan di Lakologou Sukses, Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Sampaikan Terima Kasih

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Kemah bakti dan perkemahan eksekutif pada 29-31 Agustus 2025 dalam memperingati Hari Pramuka ke-64 di Kawasan pengembangan baru Kelurahan Lakologou terbilang sukses dan cukup memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Baubau.

Oleh sebab itu, Wakil Wali (Wawali) Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M. Sc saat apel gabungan ASN di halaman



upacara kantor Wali Kota Baubau Senin (08/09/2025) menyampaikan, terima ka-

sih kepada seluruh unit kerja, camat dan lurah yang telah berkontribusi dan terlibat langsung

dalam pembenahan dan pembersihan Kawasan Lakologou yang dulunya merupakan kawasan

## Pemkot Bahas Persiapan HUT Baubau di Lakologou dan Evakuasi MBG, Realisasi Anggaran dan Verifikasi Paruh Waktu



Laporan: Andina L

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau menggelar rapat pimpinan yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc di ruang rapat lantai dua kantor Wali Kota Baubau Palagimata, Senin (08/09/2025). Rapat ini juga dihadiri oleh Asisten I Setda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si, Plt Asisten II Setda Kota Baubau Moh Abduh, STP, M.Si, Asisten III La Ode Darus Salam, S.Sos, M.Si dan kepala perangkat daerah. Dalam keterangan persnya, Asisten III Setda Kota Baubau La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si mengatakan, rapat pimpinan yang dilakukan setiap hari Senin dipimpin langsung Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsi-

nah Bolu, M.Sc telah membahas empat hal yaitu pertama adalah persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Baubau yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 mendatang dimana rapat perdananya telah dibahas waktu dibumi perkemahan Lakologou. Pada rapat persiapan HUT Kota Baubau atau Haroana Baubau 2025 telah dibahas tentang kegiatan menyambut HUT Kota Baubau dan SK kepanitiaan.

Kemudian selanjutnya menurut La Ode Darus Salam, pembahasan mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Baubau, serta membahas dapur persiapan MBG. “Dan Alhamdulillah pada saat saya mewakili Kota Baubau untuk mewakili ibu Wakil Wali Kota Baubau untuk mengikuti rapat MBG di hotel Galaxi Inn, bahwa

dapur Baubau itu terdapat 18 titik yang akan dibangun,” ungkapnya.

Sedangkan terkait mengenai evaluasi anggaran, La Ode Darus Salam mengakui sampai sekarang telah memasuki triwulan ke-IV berdasarkan laporan dari pihak keuangan bahwa untuk realisasi dari bulan Agustus, Baubau berada di angka 50% dan belanja modal masih di 14,67%. Karena itu, Wakil Wali Kota berharap segera di progress dan di bulan September ini harus segera dilaporkan ke pihak keuangan yang terealisasi harus mencapai 75%. Kemudian juga, diharapkan OPD harus mempressure supaya bisa mencapai target.

Sementara itu, untuk BKPSDM Baubau terkait verifikasi terhadap paruh waktu ternyata dilaporkan sudah terverifikasi semua. (\*)

terbengkalai sekian tahun dan sekarang ini dapat disaksikan bersama bahwa dengan kerja sama yang baik, Kawasan Lakologou mampu bersinar dengan baik.

Kemudian dengan adanya kegiatan kemah bakti dan perkemahan eksekutif dapat memberikan dampak yang sangat signifikan dalam ekonomi masyarakat disekitar Lakologou, dan itu merupakan satu pencapaian yang patut disyukuri bersama.

Menurut Wa Ode Hamsinah Bolu, dalam kemah bakti dan perkemahan eksekutif di Lakologou juga terlibat organisasi koperasi merah putih kelurahan yang merupakan satu tanggung jawab baru yang diberikan oleh negara agar bagaimana Pemkot Baubau bisa membina koperasi merah putih untuk eksis menjadi suatu lembaga keuangan ditengah masyarakat yang kuat dan mandiri. Termaksud pula

pemberdayaan karang taruna yang menjadi tanggungjawab Pemkot Baubau dalam proses pembinaannya juga ikut dilibatkan. “Saya dan bapak Wali Kota juga mengucapkan terima kasih atas kerja samanya untuk menghadirkan kesan yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat,”ujarnya..

Sementara itu, mengakhiri triwulan yang ke-III dalam tugas di tahun 2025 dimana tinggal satu kali lagi triwulan untuk menuntaskan 2025. Wawali Baubau ini berharap bisa mencatatkan prestasi yang baik diantara unit yang tercapai dan tidak kurang seperti tahun yang lalu.

Apalagi, di tahun 2025 ini merupakan tahun yang tidak mudah, karena banyak tantangan yang dihadapi dan salah satunya adalah peralihan pemerintahan yang membutuhkan koordinasi yang baik, membutuhkan kon-

solidasi sehingga pencapaiannya juga baik.. “Insha Allah dari hari-kehari bekerja sama. Kemudian juga tahun 2025 ini kita menghadapi efisiensi anggaran, serta beberapa masalah-masalah yang kita hadapi bersama, tetapi saya yakin kedepannya, dengan kerja bersama yang baik di antara kita harus memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat Kota Baubau,” ungkapnya.

Sedangkan terkait dalam menghadapi perayaan hari ulan tahun Kota Baubau atau Haroana Baubau pada bulan Oktober mendatang, Wa Ode Hamsinah Bolu mengakui tentunya membutuhkan kerja-kerja yang baik diantara semua. Oleh karena itu, kepada seluruh unit Pemkot Baubau untuk menghadirkan perayaan yang bisa memberi kesan yang baik pada masyarakat. (\*)